

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah sebagai elemen penting dalam hukum perbankan di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat, dimana adanya didukung oleh terbitnya berbagai regulasi secara kelembagaan maupun berkaitan dengan kegiatan usaha (Abdul Ghofur Anshori, 2008). Pada tanggal 16 Desember 2003 Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menfatwakan tentang status hukum bunga dalam fatwa Nomor 1 Tahun 2004 bahwa penggunaan bunga hukumnya haram, keluarnya fatwa ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan industri perbankan syariah. Selanjutnya, dilakukan pengesahan Undang-Undang Perbankan Syariah oleh Presiden pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2008 sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diharapkan akan lebih menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa perbankan syariah.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka kegiatan usaha perbankan syariah, selain dilakukan oleh Bank Syariah, juga dapat dilakukan oleh Unit Usaha Syariah (UUS). Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Sedangkan menurut jenisnya, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, berbeda dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Data Statistik Perbankan Syariah (SPS) Juni 2016 mencatat Bank Umum Syariah (BUS) mengalami peningkatan jumlah bank, dari 11 bank di tahun 2012 menjadi 12 bank di tahun 2015. Sedangkan untuk Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami mengalami penurunan, dari 24 bank pada tahun 2012 menjadi 23 bank pada tahun 2015. Untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengalami peningkatan jumlah bank, dari 158 bank di tahun 2012 menjadi 163 bank di tahun 2015. Seperti pada tabel 1.1 dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah**  
**Tahun 2012 - 2015**

Indikator	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
<b>Bank Umum Syariah</b>				
- Jumlah Bank	11	11	12	12
- Jumlah Kantor	1.745	1.998	2.163	1.190
- Jumlah Tenaga Kerja	24.111	26.717	41.393	51.413
<b>Unit Usaha Syariah</b>				
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	24	23	22	23
- Jumlah Kantor	517	590	320	311
- Jumlah Tenaga Kerja	3.108	11.511	4.425	4.403
<b>BPR Syariah</b>				
- Jumlah Bank	158	163	163	163
- Jumlah Kantor	401	402	439	446
- Jumlah Tenaga Kerja	4.359	4.826	4.704	5.102

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Juni 2016 (data diolah)

Dari data Statistik Perbankan Syariah (SPS) diatas secara keseluruhan total kantor perbankan syariah mengalami penurunan, dan jika dilihat menurut jenisnya bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang mengalami peningkatan yang paling signifikan dari 158 di tahun 2012 menjadi 163 jumlah bank di tahun 2015 dengan jumlah kantor dari 401 di tahun 2012 menjadi 446 di tahun 2015. Serta peningkatan pada jumlah tenaga kerja dari 4.359 di tahun 2012 menjadi 5.102 di tahun 2015.

Keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan pembiayaan pada perkembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh daerah. Yang dimana perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti merupakan penggerak utama sektor riil yang berpengaruh langsung terhadap

pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM pada tahun 2013 sebanyak 57,8 juta unit dengan terbagi sebagai berikut 57.189.393 unit Usaha Mikro, 654.222 unit Usaha Kecil dan 52.106 unit Usaha Menengah. Jumlah UMKM pada tahun 2013 adalah sekitar 99,99 persen dari jumlah total unit usaha. Dari total keseluruhan tenaga kerja dalam unit usaha tersebut sebesar 96,99 persen berada pada unit UMKM.

Persaingan antar bank syariah yang semakin ketat, secara langsung ataupun tidak langsung, akan berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas bank syariah. Meskipun bank syariah memiliki motivasi lebih daripada sekedar bisnis, kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profit menjadi indikator penting keberlanjutan entitas bisnis. Selain itu, kemampuan menghasilkan profit menjadi indikator penting untuk mengukur kemampuan bersaing bank syariah dalam jangka panjang (Aulia dan Ridha, 2012). Semakin banyaknya jumlah bank syariah yang beroperasi di Indonesia dengan berbagai bentuk produk dan pelayanan yang diberikan dapat menimbulkan permasalahan bank di masyarakat. Permasalahan yang paling penting adalah bagaimana kualitas kinerja dan kesehatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada. Sehingga, kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) perlu diperhatikan dan ditingkatkan untuk mendukung perkembangan ekonomi sektor riil melalui UMKM.

Pada kondisi seperti ini, maka penilaian efisiensi bank menjadi sangat penting, karena efisiensi merupakan gambaran kinerja suatu perusahaan sekaligus menjadi faktor yang harus diperhatikan bank untuk bertindak rasional dalam meminimumkan tingkat risiko yang dihadapi dalam menghadapi kegiatan

operasinya. Analisis mengenai efisiensi menjadi sangat penting karena penghimpunan dan penyaluran pembiayaan yang ekspansif tanpa memperhatikan faktor efisiensi akan berpengaruh terhadap profitabilitas bank yang bersangkutan (Muharam dan Pusvitasari, 2007). Menurut Atmawardhana (2006) dalam Gumilar dan Komariah (2011) menyatakan bahwa efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Kemampuan menghasilkan *output* yang maksimal dengan *input* yang ada merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Pada saat pengukuran efisiensi bank dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat *output* yang optimal dengan tingkat *input* yang ada, atau mendapatkan tingkat *input* yang minimum dengan tingkat *output* tertentu (Astiyah dan Jardine, 2006 dalam Gumilar dan Komariah, 2011).

Salah satu ukuran efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah rasio BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional), yaitu rasio biaya operasional yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan operasional. Rasio BOPO ini berkaitan erat dengan kegiatan operasional BPRS, yaitu penghimpunan dana dan penggunaan dana (Irman Firmansyah, 2014). Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan. Menurut Dendawijaya (2009) dalam Irman Firmansyah (2014) rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Menurut ketentuan Bank Indonesia efisiensi operasi diukur dengan BOPO dengan batas maksimum BOPO adalah 90%. Namun dengan melihat suatu industri perbankan sebagai lembaga intermediasi yang menggunakan banyak *input* dan *output*, maka

pengukuran tingkat efisiensi menggunakan rasio BOPO dianggap tidak menggambarkan tingkat efisiensi suatu bank. Hal tersebut dikarenakan perhitungan tingkat efisiensi menggunakan rasio BOPO merupakan *Partial Efficiency* (Muhammad Faza Firdaus dan Muhamad Nadrattuzaman Hosen, 2013). Melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 yang merupakan metode dengan pendekatan risiko yakni *Risk-based Bank Rating* atau RBBR terdiri dari empat faktor penilaian *Risk Profile*, *Good Corporate Governance* (GCG), *Earning*, dan *Capital*. Rasio BOPO ini terdapat dalam penilaian *Earning* (Widyaningrum dkk, 2014).

Efisiensi perbankan selain diukur dengan rasio keuangan, ada juga beberapa metode lain yaitu pendekatan *parametric* dan *non parametric*. Dalam mengukur tingkat efisiensi, menurut Berger dan Humphrey (1997) dalam Ahmad Husein Fadhlullah (2015) terdapat dua pendekatan. Pertama, melalui pendekatan *parametric* diantaranya *Stochastic Frontier Approach* (SFA), *Thick Frontier Approach* (TFA), dan *Distribution Free Approach* (DFA). Kedua, melalui pendekatan *non parametric* diantaranya *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan *Free Disposable Hull*.

Penelitian mengenai efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai bagian dari Perbankan Syariah perlu dilakukan, mengingat bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki peran penting dalam memberikan pembiayaan pada perkembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh daerah dalam mendukung perkembangan ekonomi sektor riil. Keunggulan yang dimiliki oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) antara lain produk-produk yang ditawarkan dapat diterima dikalangan masyarakat

khususnya masyarakat ekonomi menengah dan menengah kebawah. Untuk memenuhi kebutuhan kredit bagi para pengusaha dan pedagang kecil tentunya harus memenuhi kriteria mudah dan tepat waktu, sehingga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki keunggulan komparatif dengan jenis perbankan yang lain.

Dalam penelitian ini pengukuran efisiensi perbankan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). *Data Envelopment Analysis* (DEA) merupakan prosedur yang dirancang khusus untuk mengukur efisiensi relatif suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) yang menggunakan banyak *input* dan banyak *output*, dimana penggabungan *input* dan *output* tersebut tidak mungkin dilakukan (Muharam dan Pusvitasari, 2007). *Data Envelopment Analysis* (DEA) memberikan cara baru estimasi empiris seperti fungsi produksi dan atau efisiensi produksi yang menjadi landasan dalam ekonomi modern (Ditta Feicyllia Sari, Noven Suprayagi, 2015).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka judul yang diambil dalam penelitian ini yaitu “**Analisis Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Barat periode 2012-2015, dengan Menggunakan Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA)**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dituangkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Berapa besar tingkat efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Barat periode 2012-2015 berdasarkan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA)?
2. Komponen *input* dan *output* apa yang paling berpengaruh terhadap tingkat efisiensi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Barat periode 2012-2015?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ada, adalah :

1. Mengetahui tingkat efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Barat periode 2012-2015 melalui *input output* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Menganalisis komponen-komponen *input* dan *output* apa saja yang mempengaruhi tingkat efisiensi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Barat periode 2012-2015.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memberikan informasi mengenai perkembangan kinerja yang dicapai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Barat.
2. Dapat menjadi bahan referensi untuk keperluan studi dan penelitian selanjutnya.



3. Dapat memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan koreksi untuk meningkatkan kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Barat.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Penelitian ini mengukur tingkat efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Barat dengan pendekatan *frontier* yaitu dengan metode *non-parametrik Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan pendekatan intermediasi dan pendekatan produksi dengan asumsi *Variable Return to Scale* (VRS). Periode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan periode empat tahun yaitu periode 2012-2015.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai objek penelitian, metode pengambilan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, metode analisis data.

#### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang perhitungan data-data yang diperoleh dalam penelitian sehingga didapat hasilnya, yang kemudian dilakukan pembahasan terhadap hasil yang didapat guna mendapatkan kesimpulan.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini membahas kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan berisi saran-saran yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

